

MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM PENINGKATAN PRESTASI PESERTA DIDIK

Iratnawati

Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan

***Abstract:** In everyday terms, the term finance or financing comes from the word finance associated with efforts to obtain or raise capital to finance activities that will be carried out. But lately, the notion of finance or capital has been expanded, not only as an effort to raise capital, but also to include the dimensions of capital use. The expansion of understanding is a result of the awareness that capital is a scarce production factor so it needs to be used as well as possible. Education funding as stated in the National Education Standards: Government Regulation No.19 of 2005 consists of 3 major parts, namely: First, investment costs include the costs of providing facilities and infrastructure, human resource development and permanent working capital. Second, operational costs include education costs that must be spent by students to be able to follow the learning process regularly and continuously. Third, personal costs.*

***Keywords:** Management, Financing, Improvement, Achievement, Students*

I. LATAR BELAKANG

Manajemen pembiayaan selama Orde Baru yang sangat sentralistik telah menempatkan sekolah pada posisi marginal, kurang diberdayakan tetapi malah diperdayakan, kurang mandiri, pasif atau menunggu instruksi, bahkan inisiatif dan kreativitasnya untuk berkembang terpasung. Akan tetapi, dengan diberlakukannya otonomi daerah sejak 1 Januari 2001, Depdiknas terdorong untuk melakukan reorientasi manajemen sekolah dari manajemen pendidikan berbasis pusat menjadi Manajemen Berbasis Sekolah/MBS (*School Based Management/SBM*) atau disebut juga sebagai *site based management* yang diterapkan menjadi MBS.

Syamsuddin menjelaskan bahwa manajemen pembiayaan merupakan salah satu alternatif pengelolaan sekolah dalam kerangka desentralisasi dalam bidang pendidikan yang memungkinkan adanya otonomi yang luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang tinggi agar sekolah lebih leluasa dalam mengelola sumber daya dan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas, kebutuhan dan potensi setempat.¹

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi konsumtif yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik

¹ Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 293.

disadari maupun tidak disadari. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan

Manajemen pembiayaan pada sekolah adalah bentuk alternative sekolah sebagai hasil dari desentralisasi pendidikan. manajemen pada prinsipnya bertumpu pada sekolah dan masyarakat serta jauh dari birokrasi yang sentralistik. Manajemen pembiayaan berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerataan, afisiensi, serta manajemen yang bertumpu pada tingkat sekolah.

Manajemen pembiayaan dimaksudkan meningkatkan otonomi sekolah, menentukan sendiri apa yang perlu diajarkan, dan mengelola sumber daya yang ada untuk berinovasi. Manajemen pembiayaan juga memiliki potensi yang besar untuk menciptakan kepala sekolah, guru dan administrator yang professional. Dengan demikian, sekolah akan bersifat responsive terhadap kebutuhan masing-masing siswa dan masyarakat sekolah. Prestasi belajar siswa dapat dioptimalkan melalui partisipasi langsung orangtua dan masyarakat.² Sekolah seharusnya memiliki dana yang cukup untuk penyelenggaraan pendidikan. Sekolah menggunakan dana yang tersedia untuk terlaksananya proses belajar mengajar yang bermutu. Sekolah harus menyediakan dana pendidikan secara terus menerus sesuai dengan kebutuhan sekolah. Untuk itu, sekolah berkewajiban menghimpun, mengelola, dan mengalokasikan dana untuk mencapai tujuan sekolah.

Manajemen pembiayaan pada madrasah merupakan salah satu jawaban pemberian otonomi daerah di bidang pendidikan dan telah diundang-undangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi, "Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Oleh karena itu, manajemen pembiayaan wajib diketahui, dihayati, dan diamalkan oleh warga negara Indonesia terutama mereka yang berkecimpung di dunia pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah."³

Berdasarkan latar belakan di atas, dapat diketahui bahwa sekolah yang menerapkan MBS mengisyaratkan adanya proses pelaksanaan pendidikan yang efektif dengan adanya pelibatan atau partisipasi dari banyak pihak yang termasuk dalam golongan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, dalam penerapan manajemen tersebut, salah satu karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah yang perlu diperhatikan agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Yaitu manajemen pembiayaan.

² Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), h. 160.

³ Husaini Usman, *Manajemen: Teori Praktik dan Riset Pendidikan*, (Edisi Kedua; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 573.

II. MANAJEMEN PEMBIAYAAN

A. *Pengertian Manajemen Pembiayaan*

Manajemen berasal dari bahasa latin yaitu dari kata asal *katamanus* yang berarti tangan dan *agere* yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabungkan menjadi kata kerja *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda *management*, dan *manager* untuk orang melakukan manajemen. Akhirnya, *management* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.⁴

Menurut Marry Parker Follet mengemukakan definisi manajemen sebagai berikut: *“the art of getting things done through people”* artinya manajemen sebagai seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang.⁵ Sedangkan pengertian manajemen menurut Henry L. Sisk pada bukunya *Principles of Management* mengemukakan definisi manajemen sebagai berikut: *“Management is the coordination of all resources through the processes of planning, organizing, directing, and controlling in order to attain stated objectives.”*⁶ Manajemen berupa mengkoordinasikan semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan kontrol guna mencapai tujuan secara obyektif.

Menurut Sergiovanni, Barlingome, Coonbs dan Thurton mendefinisikan manajemen sebagai *“process of working with and through others to accomplish organizational goals efficiently”*. Yaitu proses kerja dengan dan melalui (memberdayakan) orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Oleh karena itu, definisinya merupakan proses terdiri atas kegiatan-kegiatan dalam upaya mencapai tujuan kerjasama (administrasi) secara efisien pengertian tersebut sesuai dengan pendapat Gorton yang menegaskan bahwa manajemen merupakan metode yang digunakan administrator untuk melakukan tugas-tugas tertentu atau mencapai tujuan tertentu.

Manajemen adalah suatu proses sosial yang berkenaan dengan keseluruhan usaha manusia dengan bantuan manusia lain serta sumber-sumber lainnya, menggunakan metode yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Manajemen adalah suatu istilah yang sulit didefinisikan dan pekerjaan manajer sulit untuk didefinisikan secara tepat (persis) ada sejumlah teori yang dimajukan bersama dengan sangat banyak deskripsi berdasarkan observasi karena sulitnya maka batas-batas manajemen pendidikan tidak jelas.⁷

⁴ Husaini Usman, *Manajemen: teori praktik dan riset pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 4

⁵ Husaini Usman, *Manajemen: teori praktik dan riset pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 2

⁶ Henry L. Sisk, *Principles of Management* (Brighton England: South-Western Publishing Company, 2001), hal.10.

⁷ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 16-17.

Sedangkan menurut beberapa pakar manajemen diberikan batasan mengenai pengertian manajemen:

1. Menurut Robert Kresther, manajemen adalah proses kerja dengan melalui orang lain untuk mencapai tujuan
2. George Terry mengemukakan bahwa kemampuan menyuruh oranglain bekerja guna mencapai tujuan
3. Menurut James A.F. Stonner manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
4. Sondang Sangian mengemukakan bahwa manajemen adalah kemampuan atau keterampilan seseorang untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain.
5. Menurut Ricard M. Hodgetts dan Steven Ultman manajemen adalah suatu proses untuk menyelesaikan sesuatu melalui orang lain
6. Menurut Donnelly manajemen adalah proses koordinasi upaya terhadap tujuan kelompok.
7. Menurut J.L. Massie, manajemen adalah proses satu kelompok kooperatif menggerakkan tindakan untuk tujuan umum.

Dalam definisi di atas mengandung unsur-unsur di bawah ini:

1. Kemampuan mempengaruhi
2. Orang, bawahan
3. Melakukan pekerjaan
4. Tujuan organisasi
5. Kerja sama antara bawahan dengan pimpinan
6. Terbatasnya sumber daya.⁸

Dalam pandangan agama Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik, sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam yang sesuai dengan unsur-unsur manajemen.⁹

Pembiayaan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Standar Nasional Pendidikan: PP RI No.19 Tahun 2005 terdiri atas 3 bagian besar yaitu:

1. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
2. Biaya operasional meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkanoleh peserta didik untuk bias mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan
3. Biaya personal yang meliputi:

⁸Soebagio Atmodiwiryo, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Ardadizya Jaya, 2000), hal. 5-6.

⁹Harbangan Siagian, *Administrasi Pendidikan*, (Semarang: Satya Wacana, 1989), hal. 130

- a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
- b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai
- c. Biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, dan lain sebagainya.

Dalam menghimpun dana sekolah memperhatikan semua potensi sumberdana yang seperti subsidi pemerintah, sumbangan masyarakat dan orangtua peserta didik, hibah, dan sumbangan lainnya. Pengelolaan dana pendidikan di sekolah harus dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan yaitu tidak diskriminatif terhadap anggaran biaya yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan sekolah.¹⁰

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang keefektifitasan dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi konsumtif yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik disadari maupun tidak disadari. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Hal ini penting, terutama dalam rangka MBS yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada masalah keterbatasan dana.¹¹

Kemampuan pembiayaan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan praktek-praktek penyelenggaraan sekolah, baik yang dikelola secara konvensional maupun berbasis MBS. Pemikiran paling optimis mengenai posisi biaya dikaitkan dengan mutu pendidikan menggariskan bahwa biaya merupakan fungsi mutu. Kata lainnya, hubungan antara penambahan biaya pendidikan dengan peningkatan mutu pendidikan bersifat linier.

Pendapat semacam ini tentu masih harus dibuktikan kebenarannya secara empiris. Bukan tidak mungkin dan memang hamper dipastikan masih banyak faktor dominan lain yang dapat mempengaruhi mutu kinerja sekolah, seperti kompetensi guru,

¹⁰ Redaksi Sinar Grafika, *Standar Nasional Pendidikan: PP RI No.19 Tahun 2005*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 35-36

¹¹ Redaksi Sinar Grafika, *Standar Nasional Pendidikan: PP RI No.19 Tahun 2005*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 171-172.

lingkungan belajar, tingkat sosial ekonomi orang tua, dan lain-lain. Biaya pendidikan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung yaitu segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya langsung yang dimaksud hal ini yaitu dimensi pengeluaran pendidikan meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan.¹² Sedangkan biaya tidak langsung yaitu pengeluaran yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan, tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi, misalnya biaya untuk hidup siswa, transportasi, jajan dan kesehatan.

B. Sumber Pembiayaan Madrasah

Pada tingkat sekolah (satuan pendidikan), biaya pendidikan diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa, dan sumbangan masyarakat. Se jauh tercatat dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), sebagian besar biaya pendidikan di tingkat sekolah berasal dari pemerintah pusat, sedangkan sekolah swasta berasal dari para siswa atau yayasan.¹³

Dalam dimensi sumber-sumber pembiayaan sekolah dapat dibagi dalam 4 kategori besar, yaitu:

- a. Hasil penerimaan umum pemerintah, merupakan sumber yang terpenting dalam pembiayaan pendidikan. Termasuk di dalamnya adalah semua penerimaan pemerintah di semua tingkat pemerintahan, baik pajak, bantuan luar negeri maupun pinjaman pemerintah. Besarnya ditentukan oleh aparat pemerintah ditingkat pusat atau daerah yang pertimbangannya berdasarkan prioritas tertentu.
- b. Penerimaan khusus untuk pendidikan seperti bantuan atau pinjaman luar negeri yang diperuntukkan untuk pendidikan, seperti UNICEF, Unesco, pajak khusus yang hasilnya seluruhnya atau sebagian diberikan untuk pendidikan.
- c. Uang sekolah atau iuran lainnya yaitu pembayaran orang tua murid secara langsung kepada sekolah berdasarkan pertimbangan tertentu.
- d. Sumbangan sukarela seperti sumbangan perseorangan, sumbangan masyarakat, dapat berupa uang tunai, barang atau jasa serta segala usaha sekolah untuk mengumpulkan dana yang sifatnya sukarela. Untuk sekolah swasta, pemerintah juga memberikan bantuan, dapat dalam bentuk (a) penempatan guru negeri yang dipekerjakan, (b) bantuan khusus untuk pembangunan gedung dan peralatan serta (c) uang rutin untuk kebutuhan rutin, bantuan ini mungkin berbentuk sumbangan, bantuan atau subsidi. Sumbangan dapat diberikan secara insidental guna menutup sebagian kecil kebutuhan rutin sedang bantuan dapat diberikan berdasarkan jumlah murid, serta subsidi diberikan untuk menutup semua pengeluaran rutin sekolah.¹⁴

¹² E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal.48

¹³ Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2003), hal. 5-6

¹⁴ Ibrahim Bafadal, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar: dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hal. 39.

Jadi pendapatan madrasah selain bersumber berasal dari orang tua siswa juga bersumber dari pemerintah, bantuan luar negeri dan sumbangan sukarela.

C. Ruang Lingkup Manajemen Pembiayaan

Manajemen pembiayaan pendidikan berbasis madrasah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan yang secara keseluruhan menuntut kemampuan madrasah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkannya secara efektif dan transparan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah, manajemen pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.

Dari berbagai hasil kajian konseptual dapat dideskripsikan menjadi bahwa manajemen pembiayaan pendidikan berbasis madrasah mencakup tiga kegiatan pokok yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Pada sebuah organisasi atau lembaga apapun bentuk dan namanya, sebelum melangkah untuk mencapai tujuan, maka terlebih dahulu ada perencanaan. Perencanaan pada sebuah lembaga sangat esensial, karena pada kenyataannya, perencanaan memegang peranan yang lebih penting dibandingkan dengan fungsi-fungsi lain. Tanpa ada perencanaan, maka akan sulit mencapai tujuan. Seorang perencana pendidikan dituntut untuk memiliki kemampuan dan wawasan yang luas agar dapat menyusun sebuah rancangan yang dapat dijadikan pegangan pada pelaksanaan proses pendidikan selanjutnya.¹⁵

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembiayaan pendidikan berbasis madrasah dalam garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan yakni penerimaan dan pengeluaran atau penggunaan.

a. Penerimaan

Penerimaan keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketepatan yang disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah. Secara konsep banyak pendekatan dipadukan sesuai dengan tatanan yang lazim yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Pengeluaran

Pengeluaran sekolah berhubungan dengan pembayaran keuangan sekolah untuk pembelian sumber atau input dari proses sekolah seperti tenaga administrasi, guru, bahan-bahan, perlengkapan dan fasilitas. Ongkos menggambarkan seluruh sumber yang

¹⁵ Udin Syaefudin Sa'ud, Abin Syamsuddin Makmun, *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 46.

digunakan dalam proses sekolah, apakah digambarkan dalam anggaran biaya sekolah atau tidak. Ongkos dari sumber sekolah menyumbangkan atau tidak terlihat secara akurat.

Dalam manajemen keuangan sekolah penyusunan anggaran belanja sekolah dilaksanakan oleh kepala sekolah dibantu para wakilnya yang ditetapkan oleh kebijakan sekolah, serta komite sekolah di bawah pengawasan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).¹⁶

3. Evaluasi dan Pertanggungjawaban

Langkah terakhir adalah evaluasi bagaimana anggaran dapat melayani dengan baik untuk meningkatkan efektifitas sekolah. Evaluasi sering menunjukkan kemungkinan adanya perbedaan di dalam: tujuan, prioritas, dan kemungkinan berbagai sumber daya yang tersedia.¹⁷ Pengawasan keuangan sekolah harus dilakukan melalui aliran masuk dan keluar uang yang dibutuhkan oleh bendahara. Hal itu dilakukan mulai dari proses keputusan pengeluaran pos anggaran, pembelanjaan, perhitungan dan penyimpanan barang oleh petugas yang ditunjuk. Secara administrasi pembukuan setiap pengeluaran dan pemasukan setiap pengeluaran dan pemasukan.

III. PRESTASI BELAJAR

Kemampuan intelektual siswa sangat menentukan keberhasilan siswa dalam memperoleh prestasi, untuk mengetahui berhasil tidaknya seseorang dalam belajar maka perlu dilakukan evaluasi, tujuannya untuk mengetahui prestasi yang diperoleh siswa setelah proses belajar mengajar berlangsung. prestasi merupakan hasil belajar yang berasal dari informasi yang telah diperoleh pada tahap proses belajar sebelumnya.¹⁸

Menurut Asep Jihad belajar adalah kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan.¹⁹ Sedangkan menurut Sardiman) belajar merupakan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan sebagainya.²⁰ Prestasi belajar yang sering disebut juga hasil belajar yang artinya apa yang telah dicapai oleh suatu siswa setelah melakukan kegiatan belajar yang mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotor.²¹

Prestasi siswa dapat diartikan hasil yang diperoleh karena adanya aktivitas belajar yang telah dilakukan. Prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari

¹⁶ E Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Professional Dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 201-204

¹⁷ Wahyosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 321

¹⁸ Asep Jihad dan Abdul Haris. *Evaluasi Pembelajaran*. (Yogyakarta : Multi Pressindo 2009), hal.1.

¹⁹ Asep Jihad dan Abdul Haris. *Evaluasi Pembelajaran*. (Yogyakarta : Multi Pressindo 2009), hal. 2

²⁰ Sardiman. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. (Jakarta: PT. Grafindo. 2000) hal. 8

²¹ Tohirin *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005), hal. 20.

kegiatan belajar karena kegiatan belajar merupakan proses sedangkan prestasi merupakan hasil dari proses belajar mengajar. Menurut Hadari Nawawi Prestasi belajar adalah tingkatan keberhasilan dalam mempelajari materi pelajaran disekolah yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes.²² Menurut Oemar Hamalik untuk mengetahui sejauh mana prestasi belajar siswa maka perlu diadakan pengukuran secara :²³

- 1) *Assessment* adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur prestasi belajar (achievement) siswa sebagai hasil dari suatu program intruksional
- 2) Pengukuran (*measurement*) berkenaan dengan pengumpulan data deskriptif tentang produk siswa dan atau tingkah laku siswa, dan hubungannya dengan standar prestasi atau norma

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dijelaskan bahwa prestasi belajar merupakan tingkat kemanusiaan yang dimiliki oleh siswa dalam menerima, menolak dan menilai informasi – informasi sesuai dengan tingkat keberhasilan sesuatu dalam mempelajari materi pelajaran, yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau rapor setiap bidang studi setelah mengalami proses belajar mengajar. Tinggi rendahnya prestasi belajar siswa dapat diketahui setelah diadakan penilaian hasil belajar.

Menurut Slameto mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar banyak jenisnya tetapi dapat digolongkan menjadi dua yaitu faktor interen dan faktor eksteren. Secara rinci faktor tersebut adalah sebagai berikut :²⁴

- a. Faktor interen meliputi :
 1. Faktor jasmani yang terdiri atas faktor kesehatan dan cacat tubuh
 2. Faktor psikologi yang terdiri atas intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kelemahan
- b. Faktor eksteren meliputi :
 1. Faktor keluarga terdiri atas cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga
 2. Faktor sekolah terdiri atas metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, disiplin, keadaan gedung, metode mengajar, dan tugas belajar
 3. Faktor masyarakat terdiri atas kegiatan siswa dalam masyarakat, media masa, temen bergaul, bentuk kehidupan masyarakat

Prestasi belajar atau hasil belajar siswa perlu diketahui oleh siswa yang bersangkutan guna mengetahui seberapa besar kemajuan yang telah dicapai oleh siswa serta seberapa baik kualitas dari proses pembelajaran itu sendiri. Prestasi belajar siswa dapat ketahui melalui proses evaluasi pembelajaran.

Menurut Muhibbin Syah tujuan evaluasi adalah sebagai berikut :²⁵

²² Hadari Nawawi *Administrasi sekolah*. Jakarta : Galio Indonesia, 2002

²³ Oemar Hamalik. *Metode Belajar dan Kesulitan-kesulitan Belajar*. (Bandung: Tarsito, 2002) hal.

²⁴ Slameto Belajar dan factor-faktor yang mempengaruhinya. Jakarta : Rineka Cipta, 2002) hal. 50

- a. Untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah diketahui siswa dalam kurun waktu proses belajar tertentu. Sehingga guru dapat mengetahui kemajuan perubahan tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran.
- b. untuk mengetahui posisi atau kedudukan siswa dalam kelompok kelasnya. posisi yang dimaksud adalah mutu kemampuan yang dimiliki siswa di kelas jika dibandingkan dengan teman – teman lainnya
- c. Untuk mengetahui tingkat usaha yang dilakukan siswa dalam belajar. Maka dengan evaluasi guru dapat mengetahui usaha yang dilakukan siswa apakah efisien atau tidak dalam usaha mencapai prestasi
- d. Untuk mengetahui sejauh mana siswa telah mendayagunakan kemampuan dan kecerdasan yang dimiliki untuk keperluan belajar dalam usaha mencapai prestasi belajar.

IV. PENUTUP

1. Manajemen pembiayaan pendidikan berbasis madrasah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan yang secara keseluruhan menuntut kemampuan madrasah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkannya secara efektif dan transparan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah, manajemen pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.
2. Prestasi Peserta Didik dapat diartikan hasil yang diperoleh karena adanya aktivitas belajar yang telah dilakukan. Prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar karena kegiatan belajar merupakan proses sedangkan prestasi merupakan hasil dari proses belajar mengajar. Prestasi belajar adalah tingkatan keberhasilan dalam mempelajari materi pelajaran disekolah yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes.

²⁵ Asep Jihad dan Abdul Haris.(2009). *Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta : Multi Pressindo 2005) hal. 60

DAFTAR PUSTAKA

- Atmodiwiryo Soebagio, 2000. *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Ardadizya Jaya)
- Abdul Haris. Asep Jihad, 2009. *Evaluasi Pembelajaran*. (Yogyakarta: Multi Pressindo)
- Hamalik.Oemar 2002. *Metode Belajar dan Kesulitan-kesulitan Belajar*. Bandung: Tarsito)
- Mulyasa E., 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Nawawi Hadari, 2002. *Administrasi sekolah*. (Jakarta: Galio Indonesia)
- Usman, Husaini, 2008. *Manajemen: teori praktik dan riset pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Sisk Henry L., 2001 *Principles of Management* (Brighton England: South-Western Publishing Company)
- Siagian Harbangan, 2000 *Administrasi Pendidikan*, (Semarang: Satya Wacana)
- Supriadi Dedi, 2003. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Bandung: PT Rosda Karya)
- Sardiman. 2000, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. (Jakarta: PT. Grafindo)
- Tohirin, 2005. *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo)
- Wahyosumidjo, 2008. *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Jakarta: Rajawali Press)